



Pemkot Belum Bisa Penuhi Target

Anggaran Kelurahan Tak Sampai 5% dari APBD

YOGYA, TRIBUN - Permendagri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan mengamanatkan, bahwa anggaran untuk daerah kota yang tidak memiliki desa dialokasikan paling sedikit 5 persen dari APBD, setelah dikurangi dana alokasi khusus, ditambah DAU (dana alokasi umum) tambahan.

Pelaksanaan Tugas (PLT) Kepala Badan Perencanaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono, menyebut bahwa Kota Yogyakarta belum bisa memenuhi target tersebut sekalipun dana kelurahan nantinya telah dicairkan.

"Hitungan kita, dasar data 2015. Itu belum sampai 5 persen termasuk dana kelurahan ditambahkan belum sampai 5 persen. Harapannya target 5 persen dapat segera tercapai untuk memperkuat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," jelasnya, Kamis (7/3).

Kadri Renggono
 PLT Kepala BPKAD
 Kota Yogyakarta

Jumlah itu dengan perhitungan setelah dikurangi dana alokasi khusus, ditambah DAU (dana alokasi umum) tambahan.

Kota Yogyakarta pada tahun ini dipastikan tidak bisa memenuhi hal tersebut meski dana kelurahan sudah dicairkan.

Dari penghitungan BPKAD Kota Yogyakarta, persentase yang ada saat ini baru di kisaran 3-4 persen.

Meski tidak memenuhi target, tapi dipastikan tidak ada sanksi dari pemerintah pusat.

Anggaran di kelurahan saat ini sekitar Rp133 miliar dari OPD dan dana stimulan wilayah sebesar Rp17 miliar per tahun.

Total anggaran untuk kelurahan mencapai Rp150 miliar per tahun.

Permendagri 130/2018 tentang mengamanatkan anggaran untuk daerah kota yang tak memiliki desa dialokasikan minimal 5% dari APBD.

GRAFS/FAUZIARAHMAN

1.
 2.
 3.
 4.
 5.

ke halaman 15

News | Bisnis | Jumpa Pels

Pemkot Belum

● Sambungan Hal 9

Berdasarkan penghitungan yang ia lakukan, persentase yang ada saat ini baru di kisaran 3-4 persen. Keberadaan dana kelurahan nantinya akan tetap dievaluasi sejauh mana penggunaan dan serapan yang ada.

"Dana kelurahan berbeda dengan dana desa. Ya, mungkin karena ini masih pertama jadi jumlahnya belum sebesar dana desa. Tapi saya percaya 2-3 tahun mendatang jumlahnya akan ditambah," bebernya.

Kadri menjelaskan, meski Kota Yogyakarta belum bisa mencapai target, tapi tidak

ada sanksi yang diberikan pemerintah pusat. Pihaknya terus berupaya memperkuat kelembagaan untuk bisa memaksimalkan penggunaan dana yang ada saat ini.

Kepala Bappeda Kota Yogyakarta, Heri karyawan mengatakan bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, mengatur beberapa hal teknis terkait anggaran di kelurahan.

Terkait besarnya, Heri menjelaskan bahwa anggaran untuk daerah kota yang tidak memiliki desa dialokasikan paling sedikit 5 persen

dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus, ditambah DAU tambahan.

"Sesuai Permendagri 130/2018 juga bahwa lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas untuk menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK di kelurahan. Saat ini kami sedang masa transisi untuk menata SDM yang ada," bebernya.

Dikelola terpadu

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, menjelaskan agar anggaran yang dialokasikan ke kelurahan dikelola secara terpadu dan mampu mencakup lima hal. Mulai dari mengentaskan kemiskinan, meningkatkan

pendapatan, menyelesaikan permasalahan, menata lingkungan, dan mewujudkan rencana pengembangan wilayah di kelurahan.

"Kita minta anggaran yang dialokasikan ke kelurahan dikelola secara terpadu. Dulu masing-masing OPD punya anggaran dan jalan sendiri-sendiri. Kini kami minta OPD bersinergi untuk lima hal tersebut," ujarnya.

Ia menjelaskan, bahwa anggaran di kelurahan saat ini sekitar Rp133 miliar dari OPD dan dana stimulan wilayah sebesar Rp17 miliar per tahun. Total anggaran untuk kelurahan mencapai Rp150 miliar per tahun. (kur)

Minim Jumlah Personel

KOORDINATOR Forum Pemantau Independen Pakta Integritas (Forpi) Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba mengatakan, belum lama ini pihaknya berkunjung ke Kantor Kecamatan Jetis dan bertemu juga dengan Lurah Bumijo.

Kamba menjelaskan, dalam pertemuan tersebut pihaknya menanyakan tentang persoalan dana kelurahan yang akan cair pada bulan Maret 2019 ini. Pada dialog tersebut didapatkan informasi mengenai jumlah personel di kelurahan yang minim, yakni lima orang. "Tentunya sangat berat dalam pengelolaan termasuk pembuatan laporannya nantinya," ucapnya, Kamis (7/3).

Selanjutnya, tambah Kamba, Lurah Bumijo meminta adanya pendamping-

an baik dari Kecamatan Jetis maupun dari Pemkot Yogyakarta. Hal ini guna memastikan tidak ada kesalahan dari penggunaan maupun laporan dana kelurahan sebesar Rp352 juta.

"Saat ini mereka menunggu kegiatan misalnya berupa Bimbingan Teknis (Bimtek) guna menunjang kapasitas dan kemampuan dalam menyusun dana kelurahan. Tentunya dengan ada-

● ke halaman 15

Minim Jumlah

● Sambungan Hal 9

nya dana kelurahan ini tidak hanya menambah pekerjaan tentunya juga merupakan beban dan tekanan psikologis

tersendiri bagi kelurahan yang ada di Kota Yogyakarta berjumlah 45 kelurahan," bebernya.

Kamba pun berpesan agar pihak kelurahan mengedepankan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola dana kelurahan. Forpi

Kota Yogyakarta, juga mendorong perlu adanya regulasi yang kuat berupa revisi peraturan wali kota (Perwal) agar dapat dirampungkan dalam waktu tidak terlalu lama. "Juga memang diperlukan pendampingan dalam pengelolaan dana kelurahan ini," ujarnya. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tapem dan Kesra	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 29 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005